KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pembahasan Belum Ditunjuk RUU TPKS Tertunda
Tanggal : Selasa, 08 Maret 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Pembahas belum Ditunjuk RUU TPKS Tertunda

PIMPINAN DPR RI belum mengizinkan rapat kerja (raker) awal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) saat masa reses. Alasannya, Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum menunjuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas RUU TPKS.

"Ketika Baleg (Badan Legislasi) meminta itu (raker awal pembahasan RUU TPKS), dicek di dalam Bamus itu belum ada penunjukan kepada AKD (pembahas RUU TPKS)," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Sufmi menyampaikan alasan Baleg mengajukan rapat pembahasan RUU TPKS meski belum ada penunjukan AKD. Pasalnya, Baleg selalu terlibat dalam setiap proses pembahasan bakal beleid.

"Sifatnya Baleg itu kan setiap (pembahasan) RUU pasti akan diharmonisasi oleh Baleg," ungkap Sufmi.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan pimpinan DPR sebenarnya telah mengizinkan sejumlah kegiatan pembahasan bakal regulasi dilakukan saat masa reses. "Dan itu kita setujui, termasuk itu RUU TPKS," ungkap Sufmi.

Namun, pimpinan DPR tidak mau memaksakan kegiatan itu dilakukan karena belum ada penunjukan AKD pembahas RUU TPKS. Pasalnya, hal itu menyalahi aturan main pembentukan aturan perundang-undangan. "Akan menyalahi aturan ketika belum ada penunjukan secara resmi kemudian diadakan raker (rapat kerja) dengan pemerintah," sebut Sufmi.

Dia meminta seluruh pihak bersabar. Proses pembahasan RUU TPKS bakal segera ditindaklanjuti pimpinan DPR. "Sesegera mungkin setelah masuk kita akan adakan rapat untuk menunjuk AKD mana yang kemudian membahas," ujarnya.

Selain itu, Sufmi menyampaikan pimpinan DPR akan membacakan surat presiden (surpres) RUU TPKS di rapat paripurna. "Dibacakan nanti (sebagai) surat masuk, ya, baru kemudian kita akan tentukan AKD yang mana karena kemarin itu terlewat," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menduga belum diizinkannya raker awal pembahasan karena surpres RUU TPKS belum dibacakan di paripurna. Namun, menurut dia, rapat kerja pembahasan tetap bisa dilakukan karena sudah kesepakatan rapat Bamus.

Meski belum mendapat kejelasan hingga saat ini, dia menyampaikan Baleg dalam posisi bersiap menyelenggarakan rapat awal pembahasan RUU TPKS jika sewaktu-waktu diizinkan pimpinan DPR. Pemerintah juga dalam posisi bersiap. (Atm/P-2)